

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang
Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga.

BUKU

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 126.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010).

Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: ILRC, 2019).

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2009).

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995).

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007).

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2005).

Sudaryatmi, Sri. *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2009).

Tjitrosudibio. R., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2006).

JURNAL

- Aljarofi, Amanda Zubaidah. *Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 09 Nomor 02, 2 desember 2019.
- Fidiani, Faida. *Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Faizal, Liky. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Asas 8, Volume 2: 63, 2016.
- Fajrin, R. N. S. *Keterkaitan kartu nikah dengan buku nikah sebagai administrasi perkawinan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok* (Doctoral dissertation, UIN sunan gunung djati bandung), 2019.
- Husnulwati, Sri, *Pencatatan Sipil dalam Tinjauan Hukum Perdata*. (Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang, 2018) Volume 16, 189-194.
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin dan Ai Romlah. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam*

Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar. Jurnal Of Law Volume 3 Nomor 2.

Latupono, Barzah. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance*, Jurnal Sasi Volume 24 Nomor 2, 2018.

Lestari, N. S., & Murti, D. S. R. *Perancangan Aplikasi Pembuatan Kartu Keluarga Berbasis Web Menggunakan PHP dan Mysql. Isu Teknologi STT Mandala*. Volume 15 Nomor 5, 2020.

Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sanger, J. P. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Administratum, Volume 3 Nomor 6, 2015.

Sofiana, Ulya. *Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Lawwam Volume 11 Nomor 1, 2017.

Syamdan, A dan Purwoatmodjo D, *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 1, 2019.

Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal legislasi Indonesia (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat) Volume 14, 2017.

Yusuf, M. Y. M. *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*. Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam, Volume 2 Nomor 2, 2020.

INTERNET

Alur Pembuatan KK. (Kelurahan Karangkidul Semarang)
<https://karangkidul.semarangkota.go.id/alurpembuatankk> diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 21.42, 2023.

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementrian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, 1 November 2021.

Fakrulloh, Zudan Arif. *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/2> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18.07 wib.

Fadillah, Aldi Nur. *Pernikahan Siri Jadi Alternatif Nikah Dini di Pangandaran*, (Detikjabar, 18 Januari 2023).

Mengapa Harus Sertakan Akta Nikah Saat Urus KK? Simak Disini Ya!, (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 23 April 2021).

Hidayati, Nita. 2022. “Kenali Ciri-Ciri Buku Nikah Palsu. Awas, Pembuat & Pengguna Bisa Kena Sanksi Pidana!”. <https://berita.99.co/buku-nikah-palsu/> Diakses pada tanggal 15 April 2023 pukul 23.42.

Persyaratan Mengurus Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun <https://capil.madiunkota.go.id/persyaratan-mengurus-akta-kelahiran/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 18.43.

Syamsuri, *Kontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat*, (Kanwilkalsel, 20 Desember 2021).

WAWANCARA

DM, *Wawancara*, Pelaku Pasangan Kawin Siri Kota Semarang, Semarang 4 Mei 2023.

Sigit Pranoto, *Wawancara*, Koordinator Pelayan TPDK Kecamatan Banyumanik, Semarang 24 Maret 2023.

Sofwan, *Wawancara*, Analis Kebijakan Muda Identitas Kependudukan Disdukcapil Kota Semarang, Semarang 4 Mei 2023.

LAMPIRAN